

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Pemda), menjelaskan bahwa desentralisasi adalah pengalihan urusan negara dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada Pemda harus mampu mengelola daerahnya sendiri, bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan publik di daerahnya masing-masing dengan dukungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterapkan sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan komponen dari APBD. Secara umum pendapatan daerah mengacu pada pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Jenis belanja di suatu daerah adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan merupakan penghasilan yang harus dibayar kembali dan pada akhirnya akan diperoleh kembali (Dahliah, 2022). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara akurat dan efektif.

Belanja daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan anggaran daerah yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk maka menyebabkan juga pertumbuhan ekonomi. Artinya belanja daerah juga mempunyai dampak tidak langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menangani belanja daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi belanja daerah, seperti pendapatan asli daerah, jumlah penduduk dan dana alokasi umum. Belanja daerah terdiri dari pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi modal dana, peningkatan belanja memerlukan dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Dalam memberikan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab memungut pajak dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana daerah terdapat dari pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dekonsentrasi, tugas pebantuan, dan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Kondisi ekonomi global pada saat pandemi covid-19 mengalami keterpurukan, imbas dari pandemi ini juga sangat berdampak di skala regional, terutama Provinsi Jawa Tengah hingga Kabupaten/Kota yang lain. Kota Semarang sebagai penyangga utama ekonomi Provinsi Jawa Tengah, memiliki kontribusi sebesar 14,07% paling tinggi diantara kabupaten kota Se Jawa Tengah, hal ini dikarenakan 17 sektor ekonomi ada di Kota Semarang, sehingga keberadaan ekonomi Kota Semarang akan berpengaruh ke daerah lain di Jawa Tengah. Capaian laju pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha Kota Semarang di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,86 persen. Pada tahun 2019, semua lapangan usaha di Kota Semarang mengalami pertumbuhan. Namun demikian kondisi ditahun 2020, akan sangat berbeda dikarenakan dampak dari covid-19 di Kota Semarang sangat berpengaruh signifikan sekali, mematahkan berbagai sektor utama, Administrasi Pemerintahan, Sektor Konstruksi, Jasa Pendidikan, Ketenagalistrikan, Transportasi, Penyediaan akomodasi, Industri Pengolahan, Perdagangan besar, UKM, dan Ritel di perkirakan akan tumbuh negatif. Namun ada juga sektor yang tumbuh positif yakni pertanian, sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan. Meski Pemerintah berinisiatif untuk membantu penghasilan masyarakat melalui bantuan sosial dengan penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi melalui pembentukan cadangan pangan dan bantuan di sektor UMKM namun secara agregat belum mampu mengangkat pendapatan

belanja daerah menjadi normal. Tidak hanya penanganan di bidang jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi saja, tetapi penanganan dibidang kesehatan juga menjadi perhatian yang besar, hal ini sejalan dengan perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mana semua pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan realokasi anggaran dengan melakukan refocusing APBD untuk menyediakan pos anggaran melalui belanja tidak terduga guna penanganan wabah pandemi covid-19 melalui program khusus penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan jaring pengaman sosial dengan mengurangi belanja rutin, modal, dan barang jasa yang bisa dihemat dan ditunda pelaksanaannya.

Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan lainnya merupakan sumber penghasilan sah lainnya dan penghasilan daerah juga digunakan untuk menyesuaikan belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai sumber pendanaan alternatif yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Adanya dana alokasi umum kepada pemerintah daerah merupakan sumber keuangan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dana alokasi umum digunakan untuk menutup kekurangan yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah dana alokasi umum secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Dengan perekonomian yang stabil maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan layanan publik juga dapat terlaksana secara optimal dan tanpa hambatan. Banyaknya jumlah penduduk setiap kota akan mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Pada belanja daerah juga demikian, bagaimana belanja daerah dapat menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka alokasi belanja daerah akan meningkat sehingga meningkatkan potensi diferensial untuk kepentingan publik (Marseno & Mulyani, 2020).

**Tabel 1.1 Tabel Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2018</b>	4.785.871.389.218,00	4.505.423.372.044,00	94,14
<b>2019</b>	4.878.515.446.834,00	4.632.756.551.348,00	94,96
<b>2020</b>	4.374.945.212.985,00	4.126.379.066.760,00	94,32
<b>2021</b>	5.336.565.925.505,00	4.764.045.946.156,89	89,27
<b>2022</b>	5.218.296.302.859,00	4.871.946.697.040,00	93,36

*Sumber : <https://bpkad.semarangkota.go.id/page/peraturan-daerah>*

Tahun 2018 presentase penyerapan belanja daerah sebesar 94,14%, 2019 menjadi 94,96% yang artinya mengalami kenaikan sebesar 0,82%. Tahun 2020 presentase belanja daerah mencapai 94,32% sedangkan 2021 menjadi 89,27% sehingga mengalami

penurunan sebesar 5,05%. Kemudian pada 2022 presentase belanja daerah mencapai 93,36% kemudian mengalami kenaikan 4,09% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pengelolaan keuangan pada tahun 2020 dilakukan berbeda karena dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada belanja daerah karena Kemenkeu secara bertahap menerapkan kebijakan penghematan dan penyesuaian anggaran untuk rencana infrastruktur fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penyerapan keuangan khususnya belanja komoditas dalam mengatasi pandemi Covid-19, memulihkan daya beli masyarakat, dan memulihkan sektor riil yang terkena dampak pandemi. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan pembelian barang seperti masker, hand sanitizer, obat-obatan, alat pelindung diri, alat tes kesehatan, rapid test, pengadaan peralatan dan prasarana medis kegiatan lain (Purwanto, 2020).

Pemerintah harus mampu memaksimalkan pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan, sehingga peningkatan PAD, DAU dan pertumbuhan jumlah penduduk perlu menjadi prioritas karena dapat mempengaruhi belanja modal daerah (Romadhon, 2021). Berikut merupakan tabel PAD, DAU dan Jumlah Penduduk Pemerintah Kota Semarang :

**Tabel 1.2 Tabel pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Jumlah Penduduk Kota Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>2018</b>	1.821.274.103.250,00	1.190.422.387.000,00	1.786.114
<b>2019</b>	2.066.333.418.588,00	1.317.186.595.000,00	1.814.110
<b>2020</b>	2.024.537.808.307,00	1.183.614.821.000,00	1.653.524
<b>2021</b>	2.385.944.758.477,00	1.167.622.970.000,00	1.656.564
<b>2022</b>	2.545.991.747.658,00	1.153.121.976.661,00	1.659.975

*Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>*

Data pada tabel diatas menunjukkan PAD 2018 sebesar 1,33 triliun rupiah dan mencapai 2,06 triliun rupiah pada 2019. Pada tahun 2020 besaran PAD yang diperoleh yaitu 2,02 dan 2,38 tahun 2021 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022 PAD yang diperoleh sebesar 2,54. Artinya, dari tahun 2018-2022 perolehan PAD mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2020. Pada data Dana Alokasi Umum DAU, perolehan di tahun 2018 mencapai 1,99 triliun rupiah dan 1,31 triliun rupiah pada tahun 2019. DAU tahun 2020 mencapai 1,18 triliun rupiah dan pada tahun 2021 diperoleh DAU sebesar 1,16 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022 mencapai 1,15 triliun rupiah. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa DAU setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan Jumlah Penduduk tahun 2019 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun setelahnya mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian (Dahliah, 2022), (Januarti et al., 2022), dan (Fajriati et al., 2021) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, artinya pendapatan asli daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan belanja daerah pemda seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa ataupun belanja lainnya. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak sesuai dengan (Safa'ah et al., 2021) dan (Handayani et al., 2022) menyatakan PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tidak menyebabkan peningkatan belanja daerah pada periode tersebut.

Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah dapat memberikan tekanan pada daerah tersebut. Karena pemerintah daerah masih mengandalkan bantuan tunai dari pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama untuk meningkatkan nilai belanja langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian (Handayani et al., 2022), (Januarti et al., 2022), dan (Safaah et al., 2022) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan. Akan tetapi, menurut penelitian (Dahliah, 2022) dan (Fajriati et al., 2021) bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan, artinya jika nilai jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka nilai belanja daerah akan mengalami penurunan ataupun sebaliknya jika nilai jumlah penduduk mengalami penurunan maka nilai belanja daerah akan mengalami kenaikan.

Pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah untuk mengeksplorasi sumber daya potensial di wilayah mereka. Namun, seringkali pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhannya melalui dana alokasi umum. Berdasarkan penelitian (Astutiawaty et al., 2022), (Marzanzius & Wilson, 2021), dan (Samsul Afif Rahula, 2020) dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, hal tersebut menunjukkan apabila dana alokasi umum mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi nilai belanja daerah. Namun pada penelitian (Nur et al, 2022) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah, dengan kata lain perubahan dana alokasi umum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap belanja daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mencantumkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Semarang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian lain yang relevan sehingga dapat menghasilkan pembaruan di masa mendatang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta usulan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 *Grand Theory* / Teori Dasar

#### 2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menggambarkan tentang hubungan antara manajer (*steward*) dengan pemilik perusahaan (*prinsipal*) (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Kepentingan manajer dan pemilik tidak sama, manajer berusaha menjalin kerjasama daripada menentangnya, karena mereka lebih memperhatikan upaya mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai (Astuti & Mildawati, 2019). Teori *stewardship* di konteks sektor publik, berasumsi bahwa tidak ada konflik antar individu karena masing-masing menginginkan tercapainya kesesuaian tujuan dalam organisasi. Suatu negara membutuhkan regulasi, tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa regulasi, hal yang mendasari adanya regulasi di negara adalah adanya perbedaan kepentingan. Untuk menjembatani perbedaan kepentingan ini, maka disusun teori ini agar tingkah laku manusia dapat terarah.

Dalam konteks belanja daerah, pemerintah daerah dapat dianggap sebagai *steward* yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dengan baik dan bertindak sesuai keinginan *prinsipal* atau masyarakat. Teori *stewardship* juga dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat memberikan layanan yang baik kepada publik, dan mampu membuat pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi dapat terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dalam penelitian akuntansi, teori *stewardship* dapat diterapkan untuk menjelaskan pengaruh faktor-faktor seperti pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, dan dana alokasi umum terhadap prioritas belanja daerah Kota Semarang pada tahun tertentu.

#### 2.1.2 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011, “Belanja Daerah ditetapkan sebagai kewajiban pemerintah daerah ditetapkan sebagai kewajiban pemerintah daerah dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja ditemukan dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah kelompok belanja berdasarkan jenis pengadaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendapatan dari PAD dan dana perimbangan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai Belanja Daerah (Sumangkut et al., 2019).

Dalam penelitian (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) Belanja Daerah adalah seluruh biaya yang berasal dari rekening umum kas daerah, dan menimbulkan ketimpangan sebagai kewajiban daerah pada tahun anggaran dan tidak dapat dilunasi oleh daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang berada di bawah kewenangannya termasuk pekerjaan wajib, pekerjaan pilihan dan bidang daerah khusus yang dilaksanakan secara bersamaan antara negara dan daerah (Kolinug et al., 2019). Belanja Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Kenaikan bersih dalam aset tetap} + \text{Beban penyusutan}$$

### 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pokok pendapatan daerah lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Octaviana, 2021). Dalam penelitian (Aldy Andrean, 2020), mengatakan pemerintah daerah memiliki pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendanaan dan kategori kegiatan yang mencakup seluruh pendapatan yang diberikan untuk mendukung kegiatan pemerintah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengidentifikasi prioritas yang didukung oleh pendapatan daerah yang memadai (Kolinug et al., 2019). Pemerintah daerah juga dapat melaksanakan otonomi daerah berdasarkan dua faktor. Pertama, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kapasitas dan mengelola sumber keuangannya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat sehingga pendapatan awal daerah menjadi sumber pembiayaan (Aldy Andrean, 2020). Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

$$PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan + Pendapatan lain yang sah$$

### 2.1.4 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa “penduduk adalah orang yang telah tinggal di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang, tetapi berencana untuk tinggal di sana” ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Sedangkan (Damanik & Sidauruk, 2020) mendefinisikan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Menurut *Neo Klasik*, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal dalam bentuk investasi, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk investasi pemerintah dapat dilihat dari belanja daerah yang dikeluarkan. Belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditujukan untuk membiayai kegiatan atau program di daerah, khususnya belanja modal (Rahmadi & Hastuti, 2022).

Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi, karena penduduk mempunyai dua peran dalam pembangunan ekonomi, yaitu *demand* dan *supply*. Dari segi *demand*, penduduk berperan sebagai konsumen, dan dari segi *supply* penduduk berperan sebagai produsen. Oleh karena itu, jika jumlah penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi apabila penduduk mempunyai kapasitas produksi yang tinggi dan mampu menyerap produk yang dihasilkan, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi akan diiringi dengan tingkat pendapatan yang tinggi, dan pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah wajib pajak yang membayar pajak daerah (Priyono & Handayani, 2021). Jumlah Penduduk dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$X = (L - M) + (I - E)$$

Keterangan :

X : pertumbuhan penduduk total

- L : jumlah kelahiran
- M : jumlah kematian
- I : jumlah imigran
- E : jumlah emigran

### 2.1.5 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2023, Dana alokasi umum merupakan sumber daya APBN yang dialokasikan dalam rangka pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja terkait pelaksanaan desentralisasi (Iqbal et al., 2020). Hal ini, DAU merupakan dana penting, adanya dana transfer pemerintah pusat merupakan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan perekonomian disuatu daerah (Putrisandya & Dewi, 2021). Alokasi ini digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat seperti fasilitas umum, gedung, jalan dan irigasi. Daerah dengan pendapatan asli daerah rendah akan memperoleh dana alokasi umum yang tinggi, sedangkan daerah dengan pendapatan asli daerah tinggi akan memperoleh dana alokasi umum rendah (Waskito et al., 2019). Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai berikut :

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan :

- DAU = Alokasi DAU per daerah
- AD = Alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar
- CF = Alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penulis sajikan penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang diteliti :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

PENULIS TAHUN	VARIABEL	HASIL
(Dahliah, 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum	1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah 2. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah 3. DAU berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah
(Safa'ah et al., 2021)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk	1. PAD dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah
(Handayani et al., 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b>	1. PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

	Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah</li> <li>3. Secara simultan PAD dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</li> </ol>
(Resti Januarti, Susi Wulandari, Silva Prasasti, Ferdi Yanto, 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</li> <li>2. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah</li> </ol>
(Fajriati et al., 2021)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah</li> <li>2. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah</li> </ol>
(Nailis Safaah et al., 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli daerah, Jumlah Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>2. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>3. Secara simultan pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> </ol>
(Nur et al, 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Dana Alokasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja daerah</li> </ol>
(Astutiawaty et al., 2022)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD dan Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</li> </ol>
(Samsul Afif Rahula, 2020)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah</li> </ol>



	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah	2. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah
(Marzanzius Arvan Ohy, Wilson Bogar, 2021)	<b>Variabel Dependen:</b> Belanja Daerah <b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, DAU	1. PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diambil dari potensi daerah berdasarkan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Nauw & Riharjo, 2021) menyatakan bahwa dalam lingkup daerah, pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemenuhan kebutuhannya dan berperan penting dalam menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan rencana pembangunan daerah. Kapasitas masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan awal daerah kemudian digunakan untuk menjalankan seluruh tanggung jawab pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nauw & Riharjo, 2021). Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dahliah, 2022), (Fajriati et al., 2021), dan (Astutiawaty et al., 2022) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian diajukan hipotesis  $H_1$  adalah sebagai berikut:

**$H_1$  : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah**

### 2.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Bagi pemerintah daerah, jumlah penduduk yang besar merupakan aset pembangunan yang penting bagi pembangunan karena dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan serta berkontribusi terhadap peningkatan output nasional. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membiayai layanan sosial bukan belanja modal atau investasi. Selain itu, jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah (Dahliah, 2022). Namun pertumbuhan penduduk yang pesat di suatu daerah juga menimbulkan permasalahan bagi perekonomian daerah, karena jumlah penduduk yang besar akan menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dari pendapatan daerah (Handayani et al., 2022). Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Handayani et al., 2022) dan (Januarti et al., 2022) menyatakan Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Dengan demikian diajukan hipotesis kedua  $H_2$  adalah sebagai berikut :

**$H_2$  : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah**

### 2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

DAU merupakan dana yang dialokasikan APBN untuk pemerataan pajak antar daerah untuk mendanai kebutuhan belanja terkait pelaksanaan desentralisasi. Dahliah (2022) Dana alokasi umum daerah ditentukan oleh besarnya kesenjangan anggaran daerah, yaitu selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Oleh karena itu, keseluruhan pendanaan yang dialokasikan ke masing-masing daerah tidak akan sama. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang lebih rendah akan memperoleh dana alokasi umum yang tinggi dan sebaliknya daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi akan memperoleh

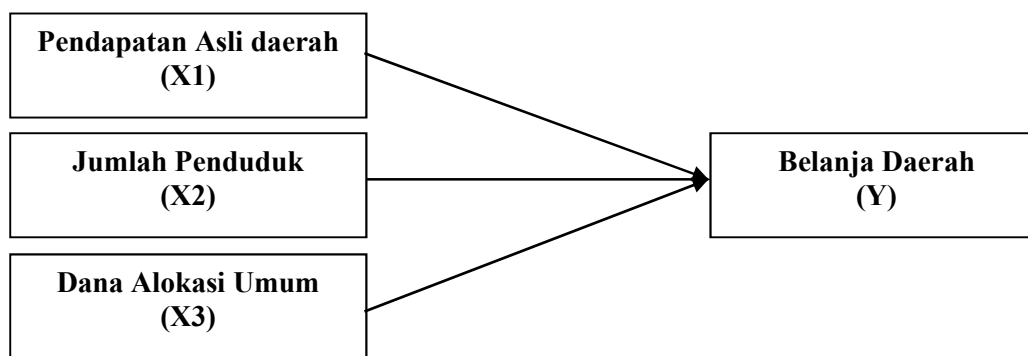
dana alokasi umum yang rendah (Sumangkut et al., 2019). Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Samsul Afif Rahula, 2020), (Astutiawaty et al., 2022), dan (Marzanzius & Wilson, 2021) menyatakan bahwa Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian diajukan hipotesis ketiga  $H_3$  adalah sebagai berikut :

**$H_3$  : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah**

## 2.4 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1 Model Penelitian**



## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis metode kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif dimana data yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk angka dan analisis menggunakan statistik digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan populasi sampel dan data tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan alat penelitian dan analisis data statistik untuk tujuan menetapkan hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal, yaitu metode penentuan hubungan sebab akibat dari penelitian antara variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diakibatkan dari variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Jumlah Penduduk (JP) ( $X_2$ ), dan Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_3$ ). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD) ( $Y$ ).

### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai ciri-ciri dan jumlah tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari suatu populasi dan digunakan untuk penelitian yang mempunyai ciri-ciri populasi. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun 2018-2022 yang diambil pada website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 5 laporan keuangan pada tahun 2018-2022.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber data (Sugiyono, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2018-2022. Data sekunder yang digunakan diambil dari laporan pendapatan tahunan yang dipublikasikan di website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Menurut (Sugiyono, 2019), operasional variabel adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti agar dapat memperoleh informasi hal tersebut dan kemudian dapat menarik kesimpulan. Variabel penelitian ini yakni variabel bebas dan variabel terikat yang diperoleh dari website BPKAD dan BPS Kota Semarang, berikut variabel dalam penelitian ini :

#### **3.4.1 Belanja Daerah**

Belanja daerah pada penelitian ini digunakan sebagai variabel terikat. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran kas daerah dalam periode akuntansi tertentu yang merupakan kontribusi daerah (Fanny Nailufar, 2019).

#### **3.4.2 Pendapatan Asli Daerah**

Adapun variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber dana yang diperoleh dari daerah setempat dengan pemerintah daerah setempat sebagai pemegang atau pengelola dana tersebut (Suparto LM, 2021).

#### **3.4.3 Jumlah Penduduk**

Variabel bebas yang kedua adalah Jumlah penduduk, merupakan semua orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis suatu kota/kabupaten NKRI lebih dari 6 bulan dan/atau yang telah bertempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berencana untuk tinggal di wilayah tersebut (Handayani et al., 2022).

#### **3.4.4 Dana Alokasi Umum**

Selanjutnya untuk variabel bebas ketiga adalah Dana Alokasi Umum, merupakan dana perimbangan dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah setempat (Waskito et al., 2019). Dana alokasi umum akan membantu mengurangi sumber dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah mengumpulkan pendapat dari daerah.

### **3.5 Alat Analisis**

Penelitian ini menggunakan jenis metode analisis data kuantitatif yang diolah secara statistik. Untuk mengelola data, peneliti menggunakan software SPSS versi 25. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk mengetahui kemungkinan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.5.1 Uji Asumsi klasik**

Sebelum menggunakan analisis linear berganda menguji secara simultan pengaruh Pendapatan asli daerah, Jumlah penduduk dan Dana alokasi umum terhadap Belanja daerah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model penelitian data yang digunakan berdistribusi normal, dan apakah terdapat gejala

autokorelasi (Nailufar & Sufitrayati, 2019). Uji yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

**1) Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah suatu model regresi berdistribusi normal (Nailufar & Sufitrayati, 2019). Dalam pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov karena sampel yang digunakan kurang dari 100 observasi. Penyebaran data dikatakan normal jika nilai signifikan model regresi pada penelitian ini lebih besar dari 0,05.

**2) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas merupakan keadaan dimana beberapa atau seluruh variabel independen mempunyai korelasi yang tinggi (Nailufar & Sufitrayati, 2019). Variabel independen yang tidak berkorelasi dapat diidentifikasi jika nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* lebih besar dari 10 dan nilai toleransi tidak kurang dari 0,10.

**3) Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi mempunyai ketimpangan pada varians residual atau observasi dibandingkan dengan observasi lainnya. Jika varians dari residual konstan di seluruh observasi, maka dikatakan homogen. Model yang baik adalah yang mengalami homogenitas variabel atau tidak mengalami heterogenitas variabel, karena model ini mengumpulkan data representatif dengan ukuran berbeda (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

**4) Uji Autokorelasi**

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji keadaan dalam model regresi dimana terdapat hubungan antar variabel yaitu terdapat korelasi antara saldo periode  $t$  dengan saldo periode sebelumnya ( $t - 1$ ). Model regresi yang baik adalah yang tidak mempunyai masalah autokorelasi. Karena adanya autokorelasi pada model regresi, maka koefisien regresi yang diperoleh sebesar tidak efektif, artinya tingkat kesalahan sangat besar dan koefisien regresi tidak stabil (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

### **3.5.2 Uji Model**

**1) Uji Koefisien Determinasi**

Menurut (Firmansyah et al., 2022) tujuan dari uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen atau untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh terhadap variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin besar R-square maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen pada suatu model regresi penelitian.

**2) Uji F**

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat diketahui secara simultan dengan memeriksa nilai tingkat signifikansi pada tabel ANOVA. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0,05 maka secara simultan variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya (Firmansyah et al., 2022).

### 3.5.2 Uji Hipotesis

Berdasarkan keterangan dalam penelitian terdahulu (Safaah et al., 2022) uji hipotesis merupakan metode uji statistik digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1) Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui arah dan pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda menguji pengaruh PAD, jumlah penduduk, dan DAU terhadap belanja daerah (Astutiawaty et al., 2022). Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{Belanja daerah} = \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ Jumlah penduduk} + \beta_3 \text{ DAU} + e$$

Keterangan :

$\alpha$  : konstanta

$\beta$  : koefisien beta dari variabel independen

$e$  : standar error pada model regresi

#### 2) Uji t

Digunakan untuk menguji besarnya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Kriteria pengujian ini ditentukan berdasarkan probabilitas. Jika tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau jika probabilitas  $H_a > 0,05$  maka dinyatakan tidak signifikan,  $H_a < 0,05$  maka dinyatakan signifikan dan  $H_a = 0,05$  maka dinyatakan signifikan (Astutiawaty et al., 2022).